

**PENGARUH *GOOD CORPORATE
GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA
PERUSAHAAN**

**(Studi Empiris Pada Perusahaan *non-financial* yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

DOMINIKUS OCTAVIANTO KRESNO WIDAGDO

NIM. C2C009064

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2014

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Dominikus Octavianto Kresno Widagdo
Nomor Induk Mahasiswa : C2C009064
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN**
Dosen Pembimbing : Anis Chariri, S.E., M.Com., Ph.D., Akt.

Semarang, 7 Mei 2014

Dosen Pembimbing

Anis Chariri, S.E., M.Com., Ph.D., Akt.

NIP. 19670809 199203 1001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Dominikus Octavianto Kresno Widagdo
Nomor Induk Mahasiswa : C2C0009064
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 28 Mei 2014

Tim Penguji:

1. Anis Chariri, S.E., M.Com., Ph.D., Akt. (.....)
2. Dr. Dwi Ratmono, M.Si., Akt. (.....)
3. Drs. Dul Mu'id., M.Si., Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Dominikus Octavianto Kresno Widagdo, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 24 April 2014

Yang membuat pernyataan,

Dominikus Octavianto K W

NIM. C2C009064

ABSTRACT

Company's performance can be seen in several indicators such as Earning Per Share. This indicators can be used as a guideline for investor to assess the company's performance. However, not all of the information that stated in financial statement was stated properly. In the company that their corporate governance is not running well, could make gap between information that stated in financial statement and fact that happen in company. Corporate governance mechanism is expected to minimize the agency problem, so the company's performance can be increase. The purpose of this study is to analyze the effect of corporate governance mechanism on company's performance.

The population in this study are all non financial companies listed on the Stock Exchange in 2012. The sampling method used in this study was purposive sampling method. The total number of samples in this study were 89 research samples. This study used multiple linear regression as analysis instrument. Before doing the regression test, it's examined by using classical assumption test.

The results of this study indicate that the independence of the audit committee , the independence of the board of commissioners , managerial ownership , the number of commissioners meeting , and the number of audit committee meetings do not affect the performance of the company . From this study, only board size is significant positive effect on firm performance .

Keywords: *corporate governance, earning per share, company's performance.*

ABSTRAK

Kinerja perusahaan dapat dilihat dalam beberapa indikator dan salah satu diantaranya adalah *Earning Per Share*. Indikator ini dijadikan panduan oleh investor dalam menilai kinerja perusahaan. Namun tidak semua informasi dalam laporan keuangan perusahaan benar. Dalam perusahaan yang tata kelolanya kurang baik, dapat terjadi ketidaksesuaian antara informasi dalam laporan keuangan dengan fakta di dalam perusahaan. Mekanisme *corporate governance* diharapkan dapat meminimalisir *agency problem* sehingga tercipta kinerja perusahaan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan non financial yang terdaftar di BEI pada tahun 2012. Metode *sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*. Jumlah total sampel dalam penelitian ini sebanyak 85 sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linear berganda. Sebelum dilakukan uji regresi, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa independensi komite audit, independensi dewan komisaris, kepemilikan manajerial, jumlah rapat dewan komisaris, dan jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Dari penelitian ini hanya ukuran dewan komisaris yang berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Kata Kunci: *corporate governance, earning per share*, kinerja perusahaan.

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“If you do not go after what you want, you’ll never have it.”

“If you do not ask, the answer will always be no.”

“If you do not step forward, you’ll always be in the same place.”

“Believe in Me, everything will be okay” – Jesus Christ

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus

Ibu, Bapak, Adik, dan Keluarga besar saya.

Seluruh keluarga besar R1 Akuntansi 2009

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Non Financial yang Terdaftar di BEI) sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Universitas Diponegoro.

Selama penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini penulis ingin berterima kasih kepada:

1. Prof. Drs. Mohamad Nasir, M.Si., Akt., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
2. Anis Chariri, S.E., M.Com., Ph.D., Akt. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, dukungan dan pengertian selama penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Prof. Dr. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt selaku Ketua Jurusan Akuntansi sekaligus dosen pengajar, terima kasih atas nasihat dan arahan yang telah diberikan kepada penulis.
4. Herry Laksito, S.E., M.Adv., Acc., Akt. selaku dosen wali
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro terutama jurusan Akuntansi, atas ilmu yang telah diberikan selama proses perkuliahan.

6. Keluarga tercinta, Bapak FX Suhartoyo, Ibu Theodora Asri, Odilius Jenar, dan Maximilia Ines, terima kasih atas doa, nasihat, motivasi dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Maria Graffeliesta Widya, terima kasih atas dukungan, penghiburan, doa, semangat serta kesabaran dalam mendukung dan menghadapi penulis sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
8. Dimas Widyatama, Ivan Herdyanto, Diyan Hafdinovianti, Angelia Dewi Anggraini, dan Sheila Aprilia Putri, terima kasih atas segala doa, dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis.
9. Teman seperjuangan, Faizal, Alex, Henry, Yuko, Santi, Icha, Leo, mbak Leditya, Revani, Rendy, mbak Yuvita, terima kasih untuk semangat dan dorongan selama ini, *see you all on top!*
10. *Randomers* Akuntansi 2009: Lovink Angel, Igantius Putu, Prima Gladia, Ema Diandra, Ivan Herdyanto, Fahry Maulana, Ridho Alief N, Mahendra Taufiq dan Rachmatika PMP terima kasih untuk candaan serta kegilaannya selama ini.
11. Tim KKN Desa Mlatiharjo, Arie, Oji, Okta, Nophek, Mira, Olif, Luthfi, Arya, Hadi, Bayu.
12. Keluarga Besar Reguler 1 Akuntansi 2009, terima kasih atas kebersamaannya selama ini, semoga kita sukses dan akan terus seperti keluarga.
13. Keluarga Besar PRMK FEB UNDIP, Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan.

14. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari kekurangan dan keterbatasan penulis selama penyusunan skripsi ini. Sehingga saran dan kritik diharapkan untuk perbaikan di kemudian hari. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Semarang, April 2014

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SRIPSI.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Rumusan Masalah.....	6
1.3.Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	7
1.3.2. Kegunaan Penelitian.....	8
1.4.Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TELAAH PUSTAKA	
2.1.Landasan Teori.....	10
2.1.1. Teori Agensi (<i>Agency Theory</i>).....	10
2.1.2. <i>Good Corporate Governance</i>	11
2.1.2.1.Ukuran Dewan Komisaris.....	12
2.1.2.2.Independensi Komite Audit.....	13
2.1.2.3.Komposisi Dewan Komisaris.....	14
2.1.2.4.Jumlah Rapat Dewan Komisaris.....	15
2.1.2.5.Jumlah Rapat Komite Audit.....	16
2.1.3. Struktur Kepemilikan.....	16
2.1.4. Kinerja Perusahaan.....	17
2.2.Penelitian Terdahulu.....	18

2.3. Kerangka Pemikiran	19
2.4. Hipotesis	21
2.4.1. Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan	21
2.4.2. Pengaruh independensi komite audit terhadap kinerja perusahaan	22
2.4.3. Pengaruh komposisi dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan	23
2.4.4. Pengaruh kepemilikan manajerial perusahaan terhadap kinerja perusahaan	24
2.4.5. Pengaruh jumlah rapat dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan	25
2.4.6. Pengaruh jumlah rapat komite audit terhadap kinerja perusahaan	26

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	27
3.1.1. Variabel Dependen	27
3.1.2. Variabel Independen	27
3.1.2.1. Ukuran Dewan Komisaris	28
3.1.2.2. Independensi Komite Audit	28
3.1.2.3. Komposisi Dewan Komisaris	28
3.1.2.4. Kepemilikan Manajerial Perusahaan	29
3.1.2.5. Jumlah Rapat Dewan Komisaris	29
3.1.2.6. Jumlah Rapat Komite Audit	29
3.2. Populasi dan Sampel	30
3.3. Jenis dan Sumber Data	30
3.4. Metode Pengumpulan Data	31
3.5. Metode Analisis	31
3.5.1. Analisis Statistik Deskriptif	31
3.5.2. Uji Asumsi Klasik	31
3.5.2.1. Uji Normalitas	31
3.5.2.2. Uji Heteroskedastisitas	32
3.5.2.3. Uji Multikolonieritas	33
3.5.3. Analisis Regresi	33
3.5.4. Uji Hipotesis	34
3.5.4.1. Uji Signifikan Parameter Individual	34
3.5.4.2. Uji Signifikan Simultan	34
3.5.4.3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	34

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian	36
4.2. Analisis Data	37
4.2.1. Analisis Deskriptif	37
4.2.2. Uji Asumsi Klasik	39

4.2.2.1. Uji Normalitas	39
4.2.2.2. Uji Multikolonieritas	40
4.2.2.3. Uji Heteroskedastisitas	41
4.2.3. Uji Hipotesis	43
4.2.3.1. Uji Koefisien Determinasi	43
4.2.3.2. Uji Signifikansi Simultan	44
4.2.3.3. Uji Signifikansi Parameter Individual	45
4.2.3.4. Hasil Uji Hipotesis	46
4.3. Intrepretasi Hasil.....	48
 BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan.....	53
5.2. Keterbatasan Penelitian	54
5.3. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN.....	58

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Ringkasan Penelitian Terdahlu	18
Tabel 4.1 Ringkasan Pengambilan Sampel Penelitian.....	36
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif	37
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas	40
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolonieritas	41
Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas	43
Tabel 4.6 Hasil Uji Koefisien Determinasi	44
Tabel 4.7 Hasil Uji Statistik F.....	45
Tabel 4.8 Hasil Uji Statistik T	46
Tabel 4.9 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran.....	20
Gambar 4.1. Uji Normalitas Residual.....	39
Gambar 4.2. Uji Heteroskedastisitas.....	42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A: Tabulasi Data.....	59
Lampiran B: Hasil Output Spss	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Keuntungan merupakan tujuan utama setiap perusahaan dalam melakukan kegiatan usaha. Semakin besar modal yang dikeluarkan perusahaan dalam melakukan kegiatan usaha, maka semakin besar pula ekspektasi keuntungan yang didapatkan perusahaan. Banyak perusahaan yang *go public* demi mendapatkan modal yang lebih besar dari pihak eksternal perusahaan dengan cara menjual saham perusahaan. Perusahaan harus menunjukkan kinerja yang baik agar pihak eksternal (investor) mau menanamkan modal pada perusahaan.

Kinerja perusahaan menggambarkan bagaimana cara dan berapa banyak sumber daya keuangan yang tersedia untuk menjalankan kegiatan produksi perusahaan. Kinerja perusahaan juga berhubungan dengan bagaimana sumber daya keuangan tersebut digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan (Marn dan Romuald, 2012). Globalisasi memunculkan adanya persaingan ketat antar perusahaan. Perusahaan saling berlomba untuk memaksimalkan kinerja perusahaannya, karena kinerja perusahaan yang baik akan menarik investor untuk menanamkan modal di perusahaan tersebut. Adanya tambahan modal dari investor akan menciptakan prospek yang lebih besar bagi masa depan perusahaan.

Bukti yang menunjukkan kinerja perusahaan adalah laporan keuangan perusahaan yang baik dan sesuai standar yang berlaku, yaitu PSAK. Laporan keuangan perusahaan menunjukkan posisi keuangan perusahaan dan juga indikator

kinerja perusahaan seperti *Earning per Share (EPS)*, *Return on Equity (ROE)*, dan *Return on Assets (ROA)*. Indikator ini yang dijadikan panduan oleh investor dalam menilai kinerja perusahaan. Namun tidak semua informasi dalam laporan keuangan perusahaan benar. Dalam perusahaan yang tata kelolanya kurang baik, bisa terjadi ketidaksesuaian antara informasi dalam laporan keuangan dengan fakta di dalam perusahaan.

Terbukanya skandal keuangan Lippo dan Kimia Farma pada tahun 2001 memunculkan *corporate governance* sebagai salah satu isu sentral dalam perekonomian Indonesia. Skandal ini adalah imbas dari krisis keuangan Indonesia pada tahun 1998 dan krisis ekonomi Asia satu tahun sebelumnya. Krisis ekonomi Asia pada tahun 1997, yang sebagian disebabkan oleh krisis ekonomi panjang yang melanda Jepang pada tahun 1990-an, memberikan dampak negatif terhadap kinerja ekonomi negara-negara di Asia Timur (Marn dan Romuald, 2012). Krisis ekonomi yang terjadi di Asia Timur dan negara lain terjadi bukan hanya faktor ekonomi makro, akan tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya *corporate governance* yang ada di negara tersebut, seperti lemahnya hukum, standar akuntansi dan pemeriksaan keuangan (*auditing*) yang belum mapan, lemahnya pengawasan komisaris, pasar modal yang masih *under-regulated* dan terabaikannya hak minoritas. (Iskander dan Chamlou, 2000). Ini menunjukkan bahwa penerapan *good corporate governance* tidak hanya berakibat positif bagi pemegang saham, tetapi juga kepada masyarakat.

Tujuan penerapan *good corporate governance* adalah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak tersebut adalah pihak

internal perusahaan seperti dewan direksi, dewan komisaris, karyawan, dan pihak eksternal perusahaan yang meliputi investor kreditur, pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan (*stakeholders*) (Arifin, 2005). Namun dalam praktiknya, penerapan *good corporate governance* berbeda di setiap negara karena berkaitan dengan sistem ekonomi, hukum, struktur kepemilikan, sosial dan budaya.

Di Indonesia, konsep *good corporate governance* mulai diperkenalkan pada tahun 1999 setelah pemerintah membentuk Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). KNKG mengeluarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia pada tahun 2000 yang kemudian direvisi pada tahun 2006. Isi dari pedoman tersebut adalah setiap perusahaan harus membuat pernyataan tentang kesesuaian penerapan *good corporate governance* dengan pedoman yang telah dikeluarkan oleh KNKG dalam laporan tahunannya. Hal ini berarti setiap perusahaan telah menerapkan prinsip *good corporate governance*.

Mekanisme *good corporate governance* diyakini dapat meminimalisir terjadinya *agency problem*. Jensen dan Meckling (1976) dalam teori agensi-nya mengatakan bahwa *agency problem* timbul karena adanya perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan (*Principal*) dengan manajemen (*Agent*). Menurut Al-Faki (2006), untuk memunculkan keselarasan antara pemilik perusahaan dan manajemen, diperlukan transparansi dari pihak manajemen kepada pemilik perusahaan, serta keadilan kepada *stakeholders* lain. Dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia disebutkan ada lima asas *good corporate governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, independensi serta

kewajaran dan kesetaraan. Kelima asas ini membantu perusahaan untuk meminimalisir adanya *agency problem*, sehingga kinerja perusahaan menjadi lebih baik.

Penerapan mekanisme *good corporate governance* dalam perusahaan tidak semudah memahami konsepnya. Penyimpangan masih bisa muncul akibat tidak adanya integritas dari manajemen perusahaan. Timbulnya ketidak taatan, kesalahan pemahaman, konflik peran, serta fungsi pengambilan keputusan diantara pengelola perusahaan, dan bahkan manipulasi keuangan oleh pihak direksi maupun manajer merupakan penyimpangan yang dapat muncul dalam proses penerapan. Keberhasilan penerapan *corporate governance* tidak hanya bergantung pada prinsip dan peraturan yang ada, melainkan bergantung pada integritas dan kualitas sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan. Etika dan budaya kerja, serta prinsip-prinsip kerja profesional memegang peranan penting dalam penerapan *corporate governance* (Rini, 2012).

Penelitian mengenai pengaruh mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap kinerja perusahaan telah banyak dilakukan, diantaranya penelitian Bukhori (2012). Penelitian dilakukan dengan metode random sampling, kinerja perusahaan diukur menggunakan *cash flow return on asset* (CFROA), dengan sampel sebanyak 160 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel independen, yaitu Dewan Direksi, Dewan Komisaris, serta Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Marn dan Romuald melakukan penelitian serupa pada tahun 2012 dengan objek perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Malaysia. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 20 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Malaysia, kinerja perusahaan diukur dari *earning per share* (EPS). Dari lima variabel independen, hanya Ukuran Dewan dan Struktur Kepemilikan yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Sebelumnya, Hardikasari (2011) melakukan penelitian yang sama namun objek penelitian adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006-2008, hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran Dewan Direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperkuat hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja perusahaan. Pada penelitian ini akan digunakan variabel-variabel *corporate governance* yaitu Ukuran Dewan Komisaris, Independensi Komite Audit, Komposisi Dewan Komisaris, dan Kepemilikan Manajerial Perusahaan yang mengacu pada penelitian Marn dan Romuald. Dewan komisaris bertugas untuk mengawasi dan melakukan pengendalian intern dalam perusahaan, oleh karena itu semakin banyak jumlah dewan komisaris dan semakin independen dewan komisaris maka pengendalian intern perusahaan akan semakin baik. Independensi komite audit juga berpengaruh pada baik tidaknya kinerja perusahaan. Semakin independen komite audit, semakin baik fungsi pengendalian yang dihasilkan. Struktur kepemilikan perusahaan berpengaruh besar terhadap kinerja perusahaan, terutama apabila terdapat kepemilikan manajerial pada perusahaan tersebut. Dewan direksi

yang memiliki saham pada perusahaan tersebut pasti menginginkan kinerja perusahaan yang maksimal sehingga mendapatkan keuntungan lebih dari presentase kepemilikan saham tersebut.

Selain itu, dalam penelitian ini ditambahkan dua variabel baru yaitu Jumlah Rapat Dewan Komisaris dan Jumlah Rapat Komite Audit. Jumlah Rapat Dewan Komisaris adalah jumlah dari rapat Dewan Komisaris dalam satu periode, sedangkan Jumlah Rapat Komite Audit adalah jumlah keseluruhan rapat dari Komite Audit dalam satu periode. Peraturan Bapepam-LK No. IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit mengatur tentang prosedur Rapat Komite Audit, yaitu Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan oleh anggaran dasar. Ini berarti Komite Audit serta Dewan wajib melakukan rapat di setiap periode. Kedua variabel baru ditambahkan dalam penelitian guna memperkuat penelitian terdahulu mengenai pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja perusahaan.

1.2. Rumusan Masalah

Kinerja perusahaan dapat dipengaruhi oleh mekanisme *good corporate governance*, yaitu : Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Komite Audit, Komposisi Dewan Komisaris, Kepemilikan Manajerial Perusahaan, Jumlah Rapat Dewan Komisaris dan Jumlah Rapat Komite Audit. Penelitian sebelumnya berfokus pada pasar saham di Malaysia dan terdapat keterbatasan karena adanya perbedaan penerapan sistem *govenance* serta perbedaan regulasi antara Malaysia dan Indonesia. Oleh karena itu dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?
2. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?
3. Apakah komposisi dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?
4. Apakah kepemilikan manajerial perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?
5. Apakah jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?
6. Apakah jumlah rapat komite audit berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka uraian secara rinci tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan
2. Menganalisis pengaruh ukuran komite audit terhadap kinerja perusahaan
3. Menganalisis pengaruh komposisi dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan
4. Menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial perusahaan terhadap kinerja perusahaan

5. Menganalisis pengaruh jumlah rapat dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan
6. Menganalisis pengaruh jumlah rapat komite audit terhadap kinerja perusahaan

1.3.2. Kegunaan Penelitian

1.3.2.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris tentang pengaruh mekanisme *good corporate governance* terhadap kinerja perusahaan.

1.3.2.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada perusahaan untuk lebih memahami mekanisme *good corporate governance* yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

1.4. Sistematika Penelitian

Skripsi ini dibagi menjadi lima bagian dengan rincian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tinjauan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dan mendukung analisis serta pemecahan masalah yang terdapat dalam

penelitian ini. Bab ini juga berisi uraian hipotesis-hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini, serta model penelitian yang akan diuji.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian metode penelitian yang terdiri dari: desain penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas, dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang karakteristik responden, hasil pengujian validitas dan reliabilitas instrumen yang digunakan, hasil pengujian asumsi klasik, hasil pengujian analisis jalur, hasil pengujian hipotesis, dan uraian analisis data yang berisi hasil pengolahan data serta interpretasi terhadap hasil tersebut.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan simpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori Agensi menjelaskan hubungan antara *principal* dengan *agent*. Hubungan keagenan merupakan hubungan kontrak antara *principal* yang mempekerjakan *agent* untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut. (Jensen dan Meckling, 1976). Namun adanya perbedaan kepentingan antara *principal* (*stakeholders*) dan *agent* (manajer) menyebabkan munculnya masalah baru. Pendelegasian *principal* kepada *agent* membuat pemilik perusahaan tidak dapat mengawasi kinerja manajer, sehingga keputusan manajer kadang tidak sesuai dengan keinginan pemilik perusahaan. Perbedaan kepentingan tersebut dapat mengarah pada tindak kecurangan dan penipuan yang dilakukan *agent* terhadap *principal*, yang dikenal dengan istilah *moral hazard*.

Konflik kepentingan antara *principal* dengan *agent*, yang sering disebut dengan *Agency problem*, timbul karena adanya *asymmetric information*, yakni ketidaksinambungan informasi yang diperoleh antara *principal* dengan *agent* (Eisendhart dalam Arifin, 2005). Konflik antara manajer dan pemilik perusahaan sering mengatur manajemen puncak perusahaan untuk mengambil keputusan tidak dalam kepentingan terbaik pemilik perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976). Dengan adanya komite audit diharapkan tidak terjadi kecurangan serta

menyetarakan informasi yang diperoleh *principal* dan *agent*, sehingga keputusan manajemen puncak lebih berimbang bagi kepentingan *principal* dan *agent* dan meningkatkan kinerja perusahaan.

2.1.2. *Good Corporate Governance*

Di Indonesia, konsep *good corporate governance* mulai diperkenalkan pada tahun 1999 setelah pemerintah membentuk Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). KNKG mengeluarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia pada tahun 2000 yang kemudian direvisi pada tahun 2006. Isi dari pedoman tersebut adalah setiap perusahaan harus membuat pernyataan tentang kesesuaian penerapan *good corporate governance* dengan pedoman yang telah dikeluarkan oleh KNKG dalam laporan tahunannya. Hal ini berarti setiap perusahaan telah menerapkan prinsip *good corporate governance*.

Mekanisme *good corporate governance* diyakini dapat meminimalisir terjadinya *agency problem*. Jensen dan Meckling (1976) dalam teori agensi-nya mengatakan bahwa *agency problem* timbul karena adanya perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan (*Principal*) dengan manajemen (*Agent*). Menurut Al-Faki (2006), untuk memunculkan keselarasan antara pemilik perusahaan dan manajemen, diperlukan transparansi dari pihak manajemen kepada pemilik perusahaan, serta keadilan kepada *stakeholders* lain. Dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia disebutkan ada lima asas *good corporate governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Kelima asas ini membantu perusahaan untuk

meminimalisir adanya *agency problem*, sehingga kinerja perusahaan menjadi lebih baik.

Tujuan penerapan *good corporate governance* adalah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak tersebut adalah pihak internal perusahaan seperti dewan direksi, dewan komisaris, karyawan, dan pihak eksternal perusahaan yang meliputi investor kreditur, pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan (*stakeholders*) (Arifin, 2005). Namun dalam praktiknya, penerapan *good corporate governance* berbeda di setiap negara karena berkaitan dengan sistem ekonomi, hukum, struktur kepemilikan, sosial dan budaya.

2.1.2.1. Ukuran Dewan Komisaris

Menurut Mulyadi (2002) dewan komisaris merupakan wakil dari para pemegang saham yang berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh manajemen dan mencegah pengendalian yang terlalu banyak di tangan manajemen. Dewan komisaris bertanggung jawab menentukan apakah manajemen telah memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian intern.

Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 Pasal 108 ayat (5) menjelaskan bahwa bagi perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) anggota Dewan Komisaris. Oleh karena itu, jumlah anggota Dewan Komisaris di Indonesia bervariasi disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Dewan komisaris bertugas dan bertanggung jawab untuk

melaksanakan pengawasan dan memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan *corporate governance* sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 Pasal 108 yang menjelaskan bahwa dewan komisaris bertugas mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaannya serta memberi nasihat kepada direksi. Oleh karena itu, dewan komisaris berpengaruh besar dalam penyelenggaraan *corporate governance* oleh perusahaan.

2.1.2.2. Independensi Komite Audit

Independensi merupakan landasan dari efektifitas Komite Audit (Tugiman, 1995). Independensi Komite Audit menjadikan Komite Audit memiliki kemandirian dalam menyampaikan sikap dan pendapat (Trihartati, 2010). BAPEPAM dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit mengatur mengenai independensi Komite Audit, seperti tercermin dalam peraturan berikut :

1. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lainnya kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
2. Bukan merupakan orang yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.

3. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.
4. Tidak mempunyai :
 - a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham utama Emiten atau Perusahaan Publik; dan atau
 - b. Hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.

Semakin banyak jumlah komite audit independen dalam perusahaan, maka semakin baik fungsi pengawasan yang dilakukan. Termasuk pengawasan pelaksanaan *corporate governance* dalam perusahaan. Maka, independensi komite audit masuk kedalam faktor penting yang mempengaruhi pelaksanaan *corporate governance* dalam suatu perusahaan.

2.1.2.3. Komposisi Dewan Komisaris

Perusahaan yang sudah melakukan *corporate governance* diwajibkan untuk mempunyai dewan komisaris independen. Dewan komisaris independen anggotanya tidak berasal dari dewan direksi ataupun pemegang saham. Karena dewan komisaris independen berfungsi sebagai pemisah kepentingan antara pemilik perusahaan dengan manajemen. Proporsi minimum dewan komisaris independen adalah 30% dari keanggotaan dewan komisaris. Dewan komisaris

independen diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dewan komisaris independen harus bukan berasal dari para pemegang saham, bukan bagian dari anggota dewan direksi ataupun anggota dari dewan komisaris (Tumbuan, 2005 dalam Sekaredi, 2011).

Proporsi dewan komisaris dalam suatu perusahaan mempengaruhi fungsi pengawasan terhadap pengambilan kebijakan perusahaan. Semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen, maka semakin baik pula fungsi pengawasan dalam perusahaan. Oleh karenanya, komposisi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap pelaksanaan *corporate governance* dalam perusahaan.

2.1.2.4. Jumlah Rapat Dewan Komisaris

Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 Pasal 108 menjelaskan bahwa dewan komisaris bertugas mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaannya serta memberi nasihat kepada direksi. Dalam rangka menjalankan tugasnya, dewan komisaris mengadakan rapat-rapat rutin untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh dewan direksi (FCGI, 2002).

Rapat dewan komisaris merupakan media komunikasi dan koordinasi antar anggota dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas manajemen. Dalam rapat tersebut akan dibahas masalah mengenai arah dan strategi perusahaan, evaluasi kebijakan yang telah diambil atau dilakukan oleh manajemen, dan mengatasi masalah benturan kepentingan (FCGI, 2002). Oleh karena itu semakin sering dewan komisaris mengadakan rapat, diharapkan pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris semakin baik dan semakin

membantu dewan direksi dalam pengambilan keputusan secara tepat. Dengan demikian, kinerja perusahaan pun semakin meningkat.

2.1.2.5. Jumlah Rapat Komite Audit

Menurut DeZoort (2002), jumlah rapat komite audit mengacu pada kesediaan anggota komite audit untuk bekerja sama untuk mempersiapkan, mengajukan pertanyaan, dan mengejar jawaban ketika berhadapan dengan manajemen, auditor internal, auditor eksternal, dan pihak-pihak lain yang relevan.

Peraturan Bapepam-LK No. IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit mengatur tentang prosedur Rapat Komite Audit, yaitu :

1. Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan oleh anggaran dasar; dan
2. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir.

Semakin sering komite audit melakukan rapat, maka semakin baik koordinasi antar anggota komite audit dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan. Maka dari itu, jumlah rapat komite audit mempengaruhi proses pengawasan dalam perusahaan, yang mana berimbas pula pada pengawasan penerapan *corporate governance* oleh perusahaan.

2.1.3. Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan dapat dibedakan menjadi tiga perspektif yang berbeda, yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan blok, dan kepemilikan institusional. Mengenai kepemilikan manajerial, jika direktur memiliki saham

perusahaan, maka direktur yang juga sebagai pemilik perusahaan dapat menginstruksikan dan mengendalikan pengelolaan perusahaan secara langsung (Jensen dan Meckling, 1976). Sehingga ada kemungkinan *agency problem* yang dihadapi akan lebih sedikit jika dibandingkan dengan perusahaan yang direkturnya bukanlah pemilik perusahaan (Seifert, Gonenc dan Wright, 2005 dalam Marn dan Romuald, 2012). Kepemilikan manajerial dianggap dapat mengurangi *agency problem* karena besar kecilnya kepemilikan manajerial menggambarkan adanya kesamaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham perusahaan. Dengan adanya kepemilikan manajerial maka manajer termotivasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

2.1.4. Kinerja Perusahaan

Kinerja suatu perusahaan adalah hasil dari aktifitas produksi perusahaan yang menggunakan sejumlah sumber daya. Kinerja perusahaan menggambarkan bagaimana cara dan berapa banyak sumber daya keuangan yang tersedia untuk menjalankan kegiatan produksi perusahaan. Kinerja perusahaan juga berhubungan dengan bagaimana sumber daya keuangan tersebut digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan (Marn dan Romuald, 2012).

Salah satu data untuk melakukan penilaian kinerja perusahaan adalah laporan keuangan perusahaan. Penilaian kinerja perusahaan dapat menggunakan rasio-rasio laporan keuangan seperti *Return on Assets (ROA)*, *Return on Equity (ROE)*, *Return on Capital Employed (ROCE)*, dan *Earning per Share (EPS)*. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *Earning per Share (EPS)* sebagai variabel pengukur kinerja perusahaan

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh mekanisme *Corporate Governance* terhadap kinerja perusahaan telah banyak dilakukan, diantaranya penelitian Iqbal Bukhori (2012). Penelitian dilakukan dengan metode random sampling, kinerja perusahaan diukur menggunakan *cash flow return on asset* (CFROA), dengan sampel sebanyak 160 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel independen, yaitu Dewan Direksi, Dewan Komisaris, serta Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Hardikasari (2011), melakukan penelitian yang sama namun objek penelitian adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006-2008, hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran Dewan Direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Marn dan Romuald (2012), melakukan penelitian serupa dengan objek perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Malaysia. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 20 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Malaysia, kinerja perusahaan diukur dari *earning per share* (EPS). Dari lima variabel independen, hanya Ukuran Dewan dan Struktur Kepemilikan yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan.

No.	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1	Ming-Cheng Wu, Hsin-Chiang Lin, I-Cheng Lin, Chun-Feng Lai (2009)	The Effects of Corporate Governance on Firm Performance	Board Size, Board Independence, CEO Duality, Insider Ownership,	Board Independence dan Insider Ownership berpengaruh positif terhadap performa perusahaan

			Stock Pledge Ratio, Deviation between Voting Right and Cash Flow Right	
2	Indah Setiawati (2012)	Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan	Kepemilikan Manajerial, Ukuran Dewan Direksi, Proporsi Komisaris Independen, Jumlah Rapat Komite Audit	Ukuran Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan
3	Iqbal Bukhori dan Raharja (2012)	Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan	Ukuran Dewan Direksi, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan	Ketiga Variabel tidak berpengaruh positif
4	Joel Tham Kah Marn dan Dondjio Fomedjou Romuald (2012)	The Impact of Corporate Governance Mechanism and Corporate performance: A study of Listed Companies in Malaysia	Board Size, Audit Committee, Board Composition, CEO Status, Ownership Structure	Board Size dan Ownership Structure berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan

2.3. Kerangka Pemikiran

Hubungan logis antar variabel-variabel dalam penelitian ini akan dijelaskan dan divisualisasikan dalam sub-bab kerangka pemikiran ini. Pembahasan alasan dan penyajian gambar sebagai berikut. Kinerja keuangan perusahaan merupakan salah satu faktor yang menunjukkan efektifitas serta efisiensi suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuannya (Hastuti, 2005). Perusahaan saling berlomba untuk memaksimalkan kinerja perusahaannya, karena kinerja perusahaan yang

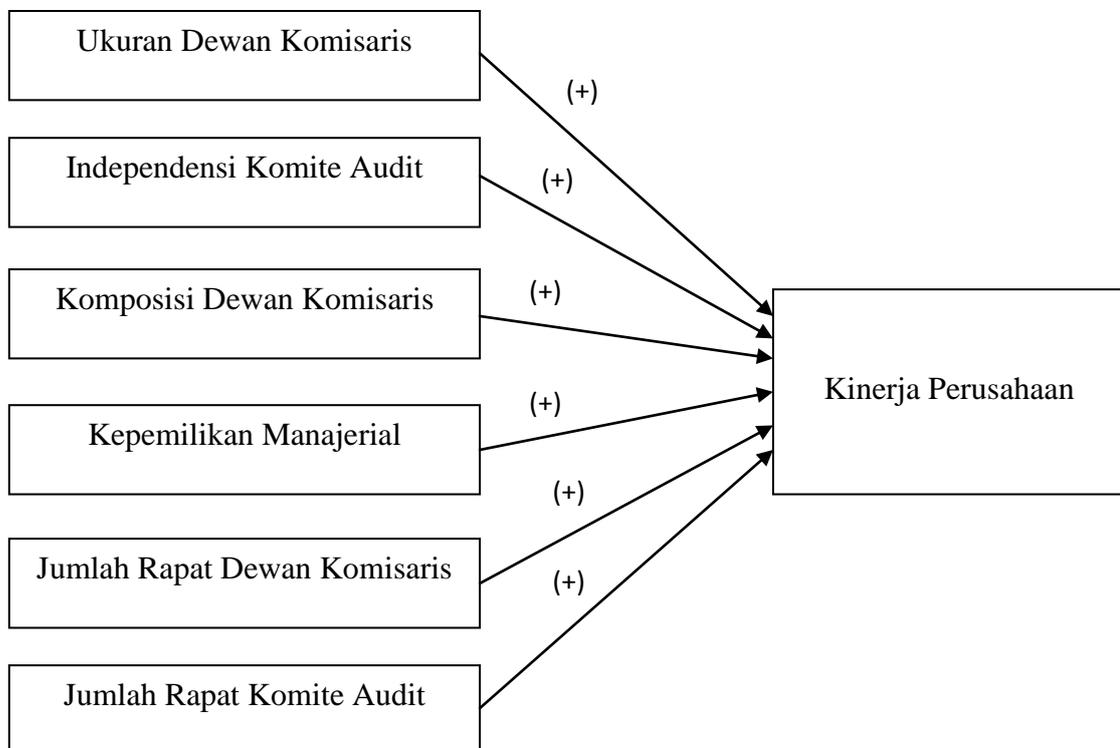
baik akan menarik investor untuk menanamkan modal di perusahaan tersebut (Marn dan Romuald, 2012). Mekanisme *corporate governance* diterapkan perusahaan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

Dalam penelitian ini, karakteristik *Good Corporate Governance* diproyeksikan menjadi 6 (enam) variabel yaitu ukuran dewan komisaris, independensi komite audit, komposisi dewan komisaris, kepemilikan manajerial perusahaan, jumlah rapat dewan komisaris, dan jumlah rapat komite audit.

Berdasarkan uraian diatas dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



2.4. Hipotesis

Berdasarkan teori yang digunakan dan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, pada sub-bab ini akan dijelaskan mengenai hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini. Terdapat enam hipotesis dalam penelitian ini. Pembahasan terperinci mengenai rumusan hipotesis disajikan sebagai berikut

2.4.1. Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan

Dalam teori agensi dijelaskan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara principal dan agent (Jensen dan Meckling, 1976). Pendelegasian principal kepada agent membuat principal tidak dapat mengawasi kinerja manajer, sehingga keputusan manajer kadang tak sesuai dengan keinginan pemilik. Oleh karena itu dibentuk dewan komisaris bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan dan memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan *corporate governance* sesuai dengan aturan yang berlaku. Fungsi pengawasan dewan komisaris adalah dengan mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaannya serta memberi nasihat kepada dewan direksi. Dewan komisaris tidak memiliki otoritas langsung terhadap perusahaan, tetapi dewan komisaris bertanggung jawab menentukan apakah manajemen telah memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian intern.

Penelitian yang dilakukan Iqbal Bukhori (2012) menyatakan bahwa ukuran dewan tidak berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Namun dalam penelitian Marn dan Romuald (2012), variabel ukuran dewan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Dengan banyaknya jumlah anggota dewan

komisaris, maka pengawasan terhadap dewan direksi menjadi jauh lebih baik, nasehat dan masukan untuk dewan direksi pun menjadi lebih banyak. Sehingga kinerja dari manajemen menjadi lebih baik dan berimbas pula pada meningkatnya kinerja perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis berikut.

H1 : Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

2.4.2. Pengaruh independensi komite audit terhadap kinerja perusahaan

Perbedaan kepentingan antara principal dan agent dapat mengarah kepada tindak kecurangan agent terhadap principal, yang dikenal dengan sebutan *moral hazard* (Jensen dan Meckling, 1976). *Moral hazard* dapat dicegah dengan pembentukan komite audit. Komite audit memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap pelaporan kinerja manajemen. Menurut BAPEPAM dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit mengatur mengenai independensi Komite Audit. Independensi Komite Audit menjadikan Komite Audit memiliki kemandirian dalam menyampaikan sikap dan pendapat (Trihartati, 2010). Sehingga ketika melakukan pengawasan terhadap pelaporan kinerja manajemen, komite audit tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

Penelitian Marn dan Romuald (2012) menunjukkan bahwa independensi komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Dengan semakin banyaknya anggota independen dalam komite audit, maka penilaian komite audit terhadap pelaporan kinerja manajemen akan semakin objektif dan andal, juga

mencegah timbulnya *moral hazard* dan menengahi *agency problem* yang muncul sehingga nantinya principal dan agent akan memiliki keselarasan tujuan yang berimbang pula pada meningkatnya kinerja perusahaan. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis berikut.

H2 : Independensi komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

2.4.3. Pengaruh komposisi dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan

Fungsi pengawasan oleh dewan komisaris dirasa belum cukup. Ini karena anggota dewan komisaris bisa saja berasal dari pemegang saham perusahaan atau anggota dewan direksi. Untuk itu setiap perusahaan yang menerapkan *corporate governance* diharuskan memiliki dewan komisaris independen. Proporsi minimum dewan komisaris independen adalah 30% dari keanggotaan dewan komisaris. Dewan komisaris independen anggotanya tidak berasal dari dewan direksi ataupun pemegang saham. Karena dewan komisaris independen berfungsi sebagai pemisah kepentingan antara pemilik perusahaan dengan manajemen.

Wu *et al.* (2009) menyatakan independensi dewan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Namun, menurut penelitian Indah Setyawati (2012) proporsi dewan komisaris tidak berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Dengan adanya dewan komisaris independen, diharapkan fungsi pengawasan terhadap dewan direksi dan manajemen perusahaan menjadi lebih optimal dan penilaian atas kinerja manajemen menjadi lebih objektif. Maka manajemen perusahaan akan terus meningkatkan kinerjanya, yang mana berimbang pula pada

meningkatnya kinerja perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis berikut.

H3 : Komposisi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

2.4.4. Pengaruh kepemilikan manajerial perusahaan terhadap kinerja perusahaan

Kepemilikan manajerial perusahaan dapat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Apabila dalam perusahaan terdapat kepemilikan manajerial, yaitu direktur memiliki saham perusahaan, maka kinerja perusahaan akan berada pada titik optimal. Ini terjadi karena direktur yang juga sebagai pemilik perusahaan dapat menginstruksikan dan mengendalikan pengelolaan perusahaan secara langsung (Jensen dan Meckling, 1976). Sehingga kemungkinan munculnya *agency problem* akan semakin tipis jika dibandingkan perusahaan yang tidak memiliki kepemilikan manajerial.

Wu *et al.* (2009) menyatakan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, sebagaimana diamini juga oleh Marn dan Romuald (2012). Namun Indah Setyawati (2012) berpendapat bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Jika direktur perusahaan juga berlaku sebagai pemilik perusahaan, maka terjadilah kesamaan tujuan antara principal dengan agent, yang berpengaruh pula pada meningkatnya kinerja perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis berikut.

H4 : Kepemilikan manajerial perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

2.4.5. Pengaruh jumlah rapat dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan

Teori Agensi menjelaskan bahwa *agency problem* terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara principal dengan agent (Jensen dan Meckling, 1976). Untuk menghindari terjadinya hal tersebut maka perusahaan menerapkan mekanisme *corporate governance*. Dalam penerapan *corporate governance* perusahaan diwajibkan untuk memiliki dewan komisaris yang bertanggung jawab mengawasi dewan direksi.

Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 Pasal 108 menjelaskan bahwa dewan komisaris bertugas mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaannya serta memberi nasihat kepada direksi. Dalam rangka menjalankan tugasnya, dewan komisaris mengadakan rapat-rapat rutin untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh dewan direksi (FCGI, 2002). Rapat dewan komisaris berfungsi sebagai sarana komunikasi dan koordinasi antar anggota dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas manajemen. Semakin banyak jumlah rapat dewan komisaris, diharapkan pengawasan terhadap dewan direksi semakin baik dan semakin membantu dewan direksi mengambil keputusan tepat. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis berikut.

H5 : Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

2.4.6. Pengaruh jumlah rapat komite audit terhadap kinerja perusahaan

Dalam teori agensi dijelaskan bahwa masing masing individu termotivasi oleh kepentingannya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara principal dengan agent. Permasalahan akibat perbedaan kepentingan ini sering disebut dengan *agency problem* (Jensen dan Meckling, 1976). Untuk menghindari terjadinya *agency problem*, salah satu cara yang diterapkan perusahaan adalah penerapan mekanisme *corporate governance*, yang salah satu elemennya adalah komite audit.

Dalam melaksanakan tugasnya, komite audit perlu melakukan rapat-rapat yang berfungsi sebagai media komunikasi dan koordinasi anggotanya dalam melaksanakan tugas pengawasan pelaporan kinerja manajemen. Menurut DeZoort (2002), jumlah rapat komite audit mengacu pada kesediaan anggota komite audit untuk bekerja sama dalam mempersiapkan, mengajukan pertanyaan, dan mengejar jawaban ketika berhadapan dengan manajemen, auditor internal, auditor eksternal, dan pihak-pihak lain yang relevan. Semakin banyak jumlah rapat, semakin terkoordinir pula tugas pengawasan yang dilakukan oleh anggota komite audit. Dengan pengawasan yang baik maka kinerja manajemen dapat ditingkatkan sehingga kinerja perusahaan pun semakin meningkat. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis berikut.

H6 : Jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Untuk menguji hipotesis yang telah diajukan, secara umum akan digunakan 2 jenis variabel yakni variabel dependen dan variabel independen.

3.1.1. Variabel Dependen

Variabel Dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh Variabel Independen atau variabel bebas (Sekaran, 2003). Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah kinerja perusahaan (PERFORMANCE) yang diukur dengan EPS (*earning per share*). Kinerja perusahaan menggambarkan bagaimana cara dan berapa banyak sumber daya keuangan yang tersedia untuk menjalankan kegiatan produksi perusahaan. Kinerja perusahaan juga berhubungan dengan bagaimana sumber daya keuangan tersebut digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan (Marn dan Romuald, 2012). Perusahaan menunjukkan kepada publik seberapa baik kinerja mereka lewat laporan keuangan tahunan perusahaan. Variabel *earning per share* ini diukur secara kuantitatif dengan menghitung jumlah deviden yang dibagikan per lembar saham.

3.1.2. Variabel Independen

Variabel Independen merupakan variabel yang membantu menjelaskan varians dalam variabel terikat (Sekaran, 2003). Dalam penelitian ini, variabel independennya adalah :

3.1.2.1.Ukuran Dewan Komisaris (BCSIZE)

Dewan komisaris bertugas mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaannya serta memberi nasihat kepada direksi. Dengan banyaknya jumlah anggota dewan komisaris, maka pengawasan terhadap dewan direksi menjadi jauh lebih baik, nasehat dan masukan untuk dewan direksi pun menjadi lebih banyak. Sehingga kinerja dari manajemen menjadi lebih baik dan berimbas pula pada meningkatnya kinerja perusahaan. Variabel ini diukur dengan banyaknya jumlah dewan komisaris yang ada dalam satu perusahaan. Data untuk variabel ini diperoleh dari laporan tahunan perusahaan.

3.1.2.2.Independensi Komite Audit (ACIND)

Independensi merupakan sikap mental yang sulit dikendalikan karena berhubungan dengan integritas seseorang. Anggota komite audit dituntut untuk independen, hal ini tercermin dari kondisi atau keadaan Komite Audit yang tidak berhubungan dengan perusahaan. Variabel ini diukur dari proporsi jumlah anggota independen dengan jumlah keseluruhan anggota komite audit. Data untuk variabel ini diperoleh dari laporan tahunan perusahaan.

3.1.2.3.Komposisi Dewan Komisaris (BCIND)

Independensi juga sikap yang dibutuhkan oleh anggota dewan komisaris. Anggota dewan komisaris dituntut untuk independen dalam melaksanakan tugasnya, yaitu mengawasi kebijakan yang diambil oleh dewan direksi perusahaan. Variabel ini diukur dari proporsi jumlah anggota independen dengan jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris. Data untuk variabel ini diperoleh dari laporan tahunan perusahaan.

3.1.2.4. Kepemilikan Manajerial Perusahaan (MO)

Kepemilikan Manajerial Perusahaan dianggap memiliki resiko paling kecil akan timbulnya *agency problem* karena pemegang saham juga bertindak sebagai anggota dewan direksi, yang nantinya akan mendorong persamaan kepentingan antara pemegang saham dengan manajer perusahaan. Variabel ini diukur dengan proporsi kepemilikan manajerial dalam perusahaan dibandingkan jumlah keseluruhan saham perusahaan.

3.1.2.5. Jumlah Rapat Dewan Komisaris (BCCONF)

Rapat dewan komisaris merupakan media komunikasi dan koordinasi antar anggota dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas manajemen. Dalam rapat tersebut akan dibahas masalah mengenai arah dan strategi perusahaan, evaluasi kebijakan yang telah diambil atau dilakukan oleh manajemen, dan mengatasi masalah benturan kepentingan. Semakin sering dewan komisaris mengadakan rapat, diharapkan pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris semakin baik dan semakin membantu dewan direksi dalam pengambilan keputusan secara tepat. Variabel ini diukur dengan jumlah rapat dewan komisaris dalam satu tahun. Data untuk variabel ini diperoleh dari laporan tahunan perusahaan

3.1.2.6. Jumlah Rapat Komite Audit (ACCONF)

Peraturan Bapepam-LK No. IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit menjelaskan bahwa Komite Audit sebaiknya menyelenggarakan rapat minimal 3 kali dalam satu tahun. Rapat Komite Audit dipercaya menjadi sarana bagi komite audit untuk melakukan tugas-tugasnya,

karena dengan melakukan rapat komite audit akan berdiskusi dan melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Variabel ini diukur dari jumlah rapat komite audit perusahaan dalam satu tahun. Data untuk variabel ini diperoleh dari laporan tahunan perusahaan.

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan *non financial* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012. Penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, yakni metode penentuan sampel dari populasi yang ada berdasarkan kriteria yang dikehendaki oleh peneliti. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian dan relatif dapat dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya. Kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan mempublikasikan laporan keuangan di tahun 2012.
2. Perusahaan merupakan perusahaan jenis *non financial*.
3. Perusahaan yang memaparkan keberadaan komite audit secara lengkap dalam laporan keuangannya.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012. Data-data tersebut diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id dan Pojok BEI Universitas Diponegoro.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan dokumentasi dan studi pustaka. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan sumber data yang didokumentasikan perusahaan seperti laporan tahunan perusahaan. Studi pustaka menggunakan berbagai literatur seperti jurnal, artikel, dan literatur lain yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

3.5. Metode Analisis

3.5.1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai suatu data yang dilihat dari nilai rata – rata (mean), standar deviasi, varian, nilai maksimum dan minimum, skewness (kemencengan distribusi), dan kurtosis (Ghozali, 2009). Standar deviasi, varian, dan nilai maksimum minimum menggambarkan persebaran data. Skewness mengukur kemencengan dari data sedangkan kurtosis mengukur puncak distribusi data. Nilai skewness dan kurtosis yang mendekati 0 berarti data terdistribusi secara normal.

3.5.2. Uji Asumsi Klasik

3.5.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel peganggu atau residual memiliki distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Terdapat dua cara untuk mendeteksi uji normalitas yakni dengan analisis grafik dan uji statistik. (Ghozali, 2006).

Analisis grafik dapat dilakukan dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal dan dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. (Ghozali, 2006).

Uji statistik yang digunakan untuk menguji normalitas residual dalam penelitian ini adalah uji statistik nonparametrik Kolmogorov Smirnov. Uji ini diyakini lebih akurat daripada uji normalitas dengan grafik, karena uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan, jika tidak hati-hati secara visual akan terlihat normal. Apabila *asymptotic significance* dalam Uji Kolmogorov Smirnov lebih besar dari 5 persen, maka data terdistribusi normal (Ghozali, 2006).

3.5.2.2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas. (Ghozali, 2006). Pada penelitian ini digunakan uji grafik scatterplot untuk menganalisis terjadinya heteroskedastisitas. Jika titik-titik tersebar secara tidak beraturan baik

di atas maupun di bawah sumbu Y maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.5.2.3. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Multikolonieritas dapat disebabkan adanya karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya *Variance Inflation Factor* (VIF).

3.5.3. Analisis Regresi

Analisis Regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen (Gujarati dalam Ghozali, 2006). Sesuai dengan rumusan masalah model regresinya adalah sebagai berikut:

$$\text{PERFORMANCE} = \beta_0 + \beta_1 \text{BCSIZE} + \beta_2 \text{ACIND} + \beta_3 \text{BCIND} + \beta_4 \text{MO} + \beta_5 \text{BCCONF} + \beta_6 \text{ACCONF} + e$$

Dimana :

- β_0 : konstanta
- BCSIZE : Ukuran Dewan Komisaris
- ACIND : Independensi Komite Audit
- BCIND : Independensi Dewan Komisaris
- MO : Kepemilikan Manajerial
- BCCONF : Jumlah Rapat Dewan Komisaris

ACCONF : Jumlah Rapat Komite Audit

e : kesalahan residual/error

3.5.4. Uji Hipotesis

Penelitian ini menggunakan regresi logistik untuk menguji seluruh hipotesis yang ada. Model ini digunakan untuk melihat kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan keuangan dengan variabel-variabel yang sama.

3.5.4.1. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji statistik – t)

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). Apabila nilai probabilitas signifikansi < 0.05 , maka suatu variabel independen merupakan menjelaskan variabel dependen secara signifikan.

3.5.4.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji Signifikansi Simultan menunjukkan pengujian pengaruh variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006). Apabila nilai probabilitas signifikansi < 0.05 , maka variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2006)

3.5.4.3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Semakin kecil nilai

R^2 maka, kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen dalam menjelaskan variasi variabel dependen semakin terbatas (Ghozali, 2006).